

# REVOLUSI BATIN MASYARAKAT HADHRAMI DI KELURAHAN AMPEL, KECAMATAN SEMAMPIR, KOTA SURABAYA

Aiman Bahalwan<sup>1</sup>

## Abstrak

Masyarakat Hadhrami adalah sebutan bagi keturunan Arab Hadhramaut yang berada di Indonesia. Sebagai kelompok imigran dan minoritas di wilayah jajahan, masyarakat Hadhrami mengalami pergulatan dalam menentukan identitasnya. Pergulatan identitas sebagai orang Hadhramaut atau orang Indonesia menghasilkan gerakan revolusi batin oleh kaum Muwallad. Eksistensi pergulatan masyarakat Hadhrami dan aktualisasi revolusi batin dalam konteks kekinian menjadi menarik untuk dikaji sebagai problematika penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat Hadhrami yang berkaitan dengan pergulatan dan aktualisasi revolusi batin, khususnya yang berada di Kampung Arab Ampel, Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data utama yang diperoleh melalui wawancara para subyek penelitian dan beberapa dokumen pendukung sebagai data sekunder. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pergulatan mencari identitas masyarakat Hadhrami masih berlangsung dan mengalami pergeseran konteks perdebatan. Pergulatan tak sekadar tentang pelaku, tetapi perilaku eksklusivitas dan inklusivitas di beberapa bidang seperti politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pergulatan dikarenakan perbedaan batasan menjaga kemurnian identitas sebagai masyarakat Hadhrami. Kedua, aktualisasi gerakan revolusi batin tetap dilakukan sebagian masyarakat Hadhrami di berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi untuk mempertahankan eksistensinya dan menjadi bagian dari pelaku pembangunan lingkungannya. Ketiga, penerimaan dan pengakuan masyarakat umum cukup baik terhadap kontribusi masyarakat Hadhrami dalam pembangunan Indonesia. Adanya upaya masyarakat Hadhrami untuk diakui dan pengakuan oleh masyarakat umum menguatkan konsep interaktif dalam politik identitas masyarakat Hadhrami.

**Kata kunci:** Politik Identitas, Revolusi Batin, Masyarakat Hadhrami

## Abstract

*The Hadhrami community is the community of Arab Hadhramaut descendants who live in Indonesia. As a group of immigrants and minorities in the colonies, the Hadhrami community struggled to determine their identity. The struggle for identity as a Hadhramaut or an Indonesian trigger an inner revolutionary movement by the Muwallads. The existence of the struggle of the Hadhrami community and the actualization of the inner revolution in the present context has become interesting to be discussed as a research problem. The research subject is the Hadhrami community which deals with the struggle and actualization of the inner revolution, especially for them who live in Ampel "Arab Area", Surabaya. The analysis was carried out by utilizing the main data obtained through interviewing the research subjects and several supporting documents as secondary data. The research results published by most people seeking the identity of the Struggle community took over challenges, but also about exclusivity and inclusiveness in several fields such as politics, education, social, cultural and economic. The struggle that makes it different depends on the purity of identity as a Hadhrami community. Second, the actualization of the inner revolutionary movement is still carried out by some Hadhrami communities in various fields such as politics, social, culture, education, and economics to maintain their existence and become part of the development of their environment. Third, the acceptance and recognition from society, is good enough for the Hadhrami community in Indonesia's development. The Hadhrami community's discussion for approval and recognition by the general public is reinforced by the interactive concept in Hadhrami community identity politics.*

**Keywords:** identity politics, inner revolutionary movement, Hadhrami community

## Pendahuluan

Di tengah pusaran politik identitas pasca Reformasi, pergulatan identitas keturunan Arab (masyarakat Hadrami) di Indonesia muncul kembali. Dalam konferensi internasional masyarakat Hadrami pada 22-23 November 2017 di Park Royal Hotel, Kuningan Jakarta dibahas tentang dinamika Hadrami di Indonesia. Tantangan dan harapan kehadiran orang-orang Hadrami dalam politik kontemporer Indonesia menjadi topik yang paling sering dibahas. Selain itu sejarah, budaya, sosial serta peran keagamaannya juga menjadi agenda pembahasan dalam konferensi tersebut.

Permulaan abad ke-20 merupakan titik awal terjadinya perubahan zaman di negeri-negeri jajahan. Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara, meluasnya keinginan untuk mengubah nasib mencapai kejayaan dan kehormatan bernegara dan hidup mulia. Tak terkecuali peranakan Arab Indonesia terkena imbas gelombang kesadaran ini (Hayaze, 2017 : xxix). Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para pejuang berdarah Arab. Mereka adalah orang-orang peranakan Arab yang berasal dari wilayah Hadhramut, Yaman. Orang-orang tersebut melakukan hijrah dan membentuk komunitas diaspora

di beberapa wilayah Indonesia. Mereka dikenal dengan nama orang Hadrami. Hingga saat ini, peranakan Arab juga aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia.

Dalam buku *Indonesian Society in Transition*, Prof. Wertheim mengatakan bahwa, “ulama-ulama Arab merupakan *the fiercest company’s enemies*” yang artinya, ulama-ulama Arab adalah lawan penjajah kolonial yang paling gigih (Hayaze, 2017 : vii). Beberapa tokoh yang dimaksud diantaranya Muhammad Shahab (Imam Bonjol), dan Saleh bin Yahya (Raden Saleh). Tokoh-tokoh lain seperti Abdurrahman Baswedan, Hoesin Bafagieh, dan Salim Ali Maskatie juga memiliki kontribusi dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Gerakan revolusi batin merupakan salah satu pintu masuk dari wacana masyarakat Hadrami untuk bergabung menjadi bagian dari Indonesia. Abdurrahman baswedan, salah satu penggagas gerakan revolusi batin mengatakan bahwa gerakan ini merupakan bentuk keberanian generasi Hadrami yang memutus hubungan dengan watan (tanah air) nenek moyangnya. Keputusan ini

menghasilkan pemikiran dan organisasi seperti Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang semakin memperkuat gerakan kebangsaan Indonesia.

Keberhasilan dalam perjuangan mengantarkan Indonesia kedepan pintu kemerdekaan tak berjalan dengan mudah. Banyak sekali rintangan yang menghadang, baik dari dalam masyarakat Hadhrami sendiri maupun faktor lainnya yang berasal dari luar. Dalam proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, tak semua masyarakat hadhrami sepakat untuk ikut terlibat. Secara internal, terjadi tarik-menarik keputusan untuk terlibat dalam proses kemerdekaan dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia mengakibatkan masyarakat Hadhrami terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berasal dari golongan tua disebut Wulaiti atau kaum totok. Kelompok Wulaiti menolak untuk ikut terlibat dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan kolonialisme. Mereka juga menolak untuk bergabung menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Alasannya, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang Hadhramaut yang singgah di nusantara dan bukan bagian dari jajahan kolonialisme belanda. Mereka berpikiran bahwa suatu saat mereka akan kembali ke tempat tinggalnya di Yaman.

Secara eksternal, pandangan kaum nasionalis pribumi yang memosisikan orang Hadhramaut sebagai “orang asing” menyulitkan kaum Muwallad dalam meyakinkan kaum nasionalis pribumi dan internal kalangan keturunan Arab yang belum seluruhnya memahami makna berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia adalah tanah air, tanah kelahiran, dan masa depan mereka.

Berbeda dengan kelompok Wulaiti, kelompok Muwallad yang berasal dari golongan muda atau peranakan Arab generasi kedua dan ketiga memilih untuk ikut terlibat dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka memilih untuk belajar menjadi Indonesia. Yaitu, memutuskan hubungan dengan Hadhramaut sebagai *watan* para nenek moyangnya dan memilih bergabung menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kelompok Muwallad tidak ingin hanya menjadi penonton dalam gelombang nasionalisme yang sedang berkejolak.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia di era kolonial mengalami dilema sikap keberpihakan dalam memberikan loyalitasnya. Aturan segregasi batasan penguasa dan yang dikuasai membuat masyarakat bingung apakah mereka bagian

dari kuasa penjajahan atau tidak. Menurut Anderson (2002) dan Kesheh (2007 : 237) konflik dalam wacana revolusi batin antara kaum Muwallad dan Wulaiti disebut sebagai komunitas yang terbatas dan inheren dalam menentukan identitas bersama hasil konstruksi sosial mereka antara menjadi muslim, Hadhrami, Arab atau muslim, peranakan Arab, dan Indonesia.

Kelompok Muwallad benar-benar menghadapi permasalahan yang rumit dan unik. Rumit karena mereka harus menghadapi dua kelompok yaitu, internal peranakan Arab (masyaikh dan ba'alawi) dan nasionalis pribumi. Selain itu mereka juga memerlukan adaptasi dalam penyatuan suatu bangsa baru ditengah-tengah keragaman suku bangsa. "Rantai" yang telah dipasang oleh kelompok Wulaiti tentang wathan, stratifikasi sosial, dan tradisi yang dianggap menghambat dalam pembangunan pandangan hidup baru tentang berbangsa

## **Kerangka Teoretik**

### **Teori Politik Identitas**

Politik Identitas tak berbeda jauh dengan konsep identitas itu sendiri, yang mana dijelaskan oleh Suparlan (2004) bahwa jati diri seseorang dapat diitandai dengan adanya sifat atau kepribadian tertentu yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan

dan bernegara juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh kelompok Muwallad dalam revolusi batin.

Dalam konteks kekinian, terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menjadi bukti bahwa revolusi batin masyarakat Hadhrami terus berlangsung. Hal ini semakin menarik karena jabatan politik yang diterima oleh masyarakat Hadhrami berasal dari pilihan rakyat secara langsung. Bukan jabatan pemberian seperti menteri, duta besar, dan jabatan lainnya yang pernah kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana aktualisasi gerakan revolusi batin dalam revolusi batin masyarakat Hadhrami di Indonesia? Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui aktualisasi gerakan revolusi batin dalam revolusi batin masyarakat Hadhrami di Indonesia.

menurut Buchari (2014) mengungkapkan bahwa konsep identitas itu karakter khusus yang mana bisa membedakan antar individu, dan hal ini bisa diketahui melalui komunikasi atau di dalam pergaulan.

Politik Identitas adalah adanya bukti bukti atau kejadian atas ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang. Penjelasan inilah yang dipaparkan oleh Cressida Heyes dalam Buku Stanford Encyclopedia of Philosophy (2007). Politik Identitas sendiri menegaskan bahwa adanya kelompok sosial tertentu yang harus dibebaskan dari kondisi-kondisi yang buruk yang mana melibatkan anggota anggota dari kelompok sosial tersebut.

Merujuk pada Castells (2007 : 6) yang mengatakan bahwa identitas merupakan atribut yang melekat kepada seseorang secara kultural, masyarakat Hadhrami di Indonesia secara tegas teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat non pribumi yang terpisah dari masyarakat asli Indonesia walaupun dalam diri mereka melekat identitas kesukuan Indonesia.

Politik identitas dikalangan orang Hadhrami bisa dengan sangat mudah tampak pada stereotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan orang Hadhrami yang hidup berkelompok di wilayah tertentu (disebut kampung Arab), perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Haflatul Ied dan Gambus Jalsah ketika pernikahan. Namun demikian, Castells juga menegaskan bahwa: "Identities

can also be originated from dominant institutions, they become identities only when and if social actors internalize them and construct their meaning around this internalization" (Castells, 2003 : 7). Castells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri-ciri dan stereotip yang dilekatkan pada mereka.

Politik identitas berakar pada stereotip yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep polity Aristoteles, Primordialisme berarti "berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam". Karena itu, politik identitas selalu diwarnai konflik baik yang bersifat frontal maupun yang dialektik. Politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Dalam wacana pluralisme, ketika demokratisasi digulirkan dan mendapatkan dukungan kuat dari konsep multikulturalisme, politik identitas seolah menemukan kekuatannya, dimana keberadaan minoritas berubah dari didiamkan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan baik dengan melakukan

asimilasi maupun akulturasi yang bersifat sistemik. Perjuangan politik identitas akan menemukan muaranya saat streeitf yang dilekatkan dapat disejajarkan dengan eksistensi kelompok dengan identitas lain dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa dilakukan dalam kultur demokrasi.

Dari beberapa pemahaman di atas, politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggotaanggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras,

### **Aktualisasi Revolusi Batin**

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Hadhrami mendirikan institusi pendidikan seperti Al Irsyad Al Islamiyyah dan Al Khairiyyah di Surabaya. Kedua institusi pendidikan ini sangat berperan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Al Isryad Al Islamiyyah umumnya digerakkan oleh masyarakat Hadhrami dari kalangan masyaikh, sedangkan Al Khairiyyah menjadi wadah pergerakan kalangan alawiyyin atau biasa disebut ba'alawi.

etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan.

Penelitian ini akan melihat bagaimana pergulatan mencari identitas dalam revolusi batin masyarakat Hadhrami dan aktualisasi revolusi batin tersebut di Indonesia. Konstruksi identitas seperti yang dikatakan oleh Castells secara langsung memposisikan masyarakat Hadhrami sebagai komunitas yang eksklusif dan memiliki ruang sosial yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat pribumi, hal ini terjadi karena penguasaan mereka atas sektor agama dan sosial.

Di Surabaya, Al Irsyad Al Islamiyyah didirikan pada tahun 1919. Pendirian ini pertama kali bergerak di bidang pendidikan. Lima tahun berselang, Al Irsyad mulai berkembang menjadi Yayasan Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah Surabaya (YPAS). Didirikannya lembaga pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya masyarakat Hadhrami yang tinggal di sekitar kampung Arab, Ampel Surabaya.

Perkembangan Yayasan Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah Surabaya begitu pesat. Hingga saat ini, Al Irsyad telah memiliki lembaga pendidikan dari jenjang TK hingga SMA dan SMK. Sekolah yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda no. 46 (dulu Ambachtschoolweg atau Benteng Miring) ini menjadikan pelajaran Agama Islam dan Bahasa Arab sebagai keunggulan pengajarannya. Hal ini wajar karena latar belakang Al Irsyad dan lokasi berdirinya yang berada di pusat pergerakan Islam dan tempat berkumpulnya masyarakat Hadhrami. Meski demikian, pelajaran umum tetap menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

Tak jauh berbeda dengan sebelumnya, YPAS bertekad menjadi agen perubahan masyarakat dan contoh bagi sekolah lainnya. Beberapa hal tersebut diwujudkan dengan cara membentuk siswa yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'aala. Selain itu, kemampuan siswa secara akademik juga diasah agar mereka dapat diterima di sekolah-sekolah favorit pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Selain Al Irsyad Al Islamiyyah, ada pula Yayasan Al Khairiyyah yang juga berperan dalam perkembangan pendidikan

di Indonesia. Letak sekolah yang tak jauh dari Al Irsyad ini juga memiliki beberapa jenjang pendidikan mulai dari KB-TK hingga SMP. Yayasan ini berdiri beberapa tahun setelah Al Irsyad didirikan, tepatnya pada tahun 1967. Perkembangannya begitu pesat, terlihat dari didirikannya Madrasah Diniyyah Lilbanat pada tahun 2007, dan Madrasah Diniyyah Lilbanin tiga tahun setelahnya ([alkhairiyahsby.com](http://alkhairiyahsby.com), diakses pada 1 November 2018).

Secara umum, visi misi Yayasan Al Khairiyyah tak jauh berbeda dengan Yayasan Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah. Melalui pendidikannya, Al Khairiyyah memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pengetahuan keIslaman dan umum. Generasi yang unggul dan kompetitif menjadi *output* dari proses pendidikan di sekolah Al Khairiyyah. Namun, ada sedikit perbedaan dari visi misi Al Khairiyyah, yaitu adanya modernisasi tak serta merta meninggalkan nilai-nilai prinsip yang telah diajarkan oleh pendahulunya. Sehingga nilai-nilai luhur tetap dijaga dan dilestarikan.

Dalam penguatan identitasnya sebagai bagian dari Indonesia, masyarakat Hadhrami juga melakukan revolusi batin di bidang politik. Masyarakat Hadhrami ikut

mengambil peran dalam aktivitas kehidupan perpolitikan di Indonesia. Sejarah mencatat beberapa nama masyarakat Hadhrami yang memiliki jabatan politik diantaranya, Ali Alatas (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1988-1999 era Presiden Soeharto dan BJ Habibie), Dr. H. Salim Segaf Al-jufri (Menteri Sosial 2009-2014), Djamal Aziz, B.Sc, SH., MH. (Anggota Komisi X DPR RI 2009-2014 Fraksi Hanura), Mustofa Assegaf, M.Si (Anggota DPR RI 2014-2019), Nur Hayati Ali Assegaf (Anggota Komisi 1 DPR RI 2014-2019), Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022), dan sebagainya.

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, beberapa masyarakat Hadhrami telah berperan secara politik untuk memerdekakan Indonesia. Berbagai cara mereka lakukan, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Secara organisasi, persatuan Arab Indonesia (PAI) yang kemudian berkembang menjadi partai Arab Indonesia merupakan bukti pergerakan masyarakat Hadhrami. Contohnya, pengakuan negara-negara timur tengah atas kemerdekaan bangsa Indonesia tak terlepas dari peran masyarakat Hadhrami seperti Abdurrahman Baswedan (AR Baswedan), Salim Bahalwan, dan M. Asad Shahab. Melalui kemampuan diplomasinya, AR

Baswedan dan Salim Bahalwan berangkat ke Mesir dan menyampaikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Didukung oleh M. Asad Shahab melalui Arabian Press Board (APB) yang didirikan lima belas hari pasca kemerdekaan, kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia internasional. Berkat perjuangan ini kemerdekaan Indonesia didukung oleh beberapa Negara timur tengah seperti Palestina dan Mesir. Diawali dengan Mufti Palestina, Syaikh Muhammad Amin al-Hussaini, di Radio Berlin pada tahun 1944 yang menyerukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Disusul Mesir, negara berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap Palestina dan Mesir ini menjadikan negara-negara timur tengah lain ikut mendukung dan membentuk panitia pembela Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan internasional di PBB dan Liga Arab. Setelah kemerdekaan Indonesia, Partai Arab Indonesia dibubarkan dengan tujuan agar masyarakat Hadhrami dapat membaaur dan melanjutkan perjuangan melalui partai-partai politik yang ada di Indonesia. Tak jauh beda dengan dewasa ini, keputusan mengambil peran dalam politik bukan tanpa alasan. Perasaan memiliki Indonesia sebagai sesama anak bangsa membuatnya peduli terhadap perkembangan Indonesia dan menjadikan



politik sebagai salah satu jalur aktualisasi harapan. Simpati dan empati terhadap kondisi politik dalam negeri dan luar negeri menjadikan beberapa diantara masyarakat Hadhrami memilih masuk ke dunia politik.

Meski sebelum-sebelumnya masyarakat Hadhrami umumnya mendapatkan jabatan atas pemberian atau tidak langsung, seperti menteri, pejabat eselon di kementerian, tetapi saat ini telah berkembang seiring terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies merupakan bukti bahwa revolusi batin masyarakat Hadhrami tetap berlangsung dan berkembang. Tak hanya itu, eksistensi masyarakat Hadhrami di lingkungannya semakin diakui dan diterima masyarakat umum. Anies juga berpandangan bahwa pilihan orang-orang baik untuk terjun ke dunia politik tak perlu dipermasalahkan. Sebab, kehadiran mereka penting untuk memimpin kita kedepan dengan waktu yang telah ditentukan.

Pergerakan revolusi batin masyarakat Hadhrami di bidang politik dapat dikatakan sebagai gerakan transformatif dan reformatif. Gerakan revolusi batin Partai Arab Indonesia mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan. Selanjutnya gerakan reformatif masyarakat Hadhrami

terlihat dari estafet perjuangan yang dilanjutkan melalui jabatan politik, kendaraan politik, dan kepentingan masing-masing.

Aktualisasi revolusi batin masyarakat Hadhrami juga dilakukan di bidang sosial. Upaya-upaya untuk menunjukkan eksistensinya dalam pembangunan Indonesia dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial seperti Yayasan Majelis Amal Sholeh (Yamas) dan Yayasan Al Iskan. Tanggungjawab moral sebagai “Orang Indonesia” yang dirasakan masyarakat Hadhrami membuatnya tergerak melakukan perbaikan di lingkungannya. Melalui yamas, masyarakat Hadhrami melakukan pergerakan reformatif untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti, pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selain yamas, adapula lembaga sosial yang dimotori oleh masyarakat Hadhrami yaitu Yayasan Al Iskan. Meski secara umum mempunyai tujuan yang sama, tetapi pergerakan yayasan al iskan lebih berfokus pada bantuan pendidikan kepada masyarakat Hadhrami dan masyarakat umum lainnya agar keberlangsungan pendidikannya terjamin.

Yayasan Majelis Amal Sholeh (Yamas) dan Yayasan Al Iskan Surabaya

sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ratusan masyarakat telah merasakan bantuan yang disalurkan oleh kedua yayasan ini. Berdasarkan laporan keuangan Yamas di bulan September 2018, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp96.340.000 yang digunakan untuk pemberdayaan di bidang pendidikan, pangan, kesehatan, dakwah, ekonomi, kemanusiaan, yatim, dan fakir miskin. Sebagaimana dalam politik identitas, kelompok minoritas selalu melakukan asimilasi dan akulturasi yang bersifat sistemik untuk memperkuat posisinya di suatu lingkungan.

Begitu pula dengan masyarakat Hadhrami, budaya menjadi bidang keempat dalam aktualisasi revolusi batin. Asimilasi dan akulturasi budaya Hadhramaut dan Indonesia dilakukan oleh masyarakat Hadhrami untuk memperkuat eksistensi identitasnya sebagai bagian dari Indonesia.

Musik dan tarian menjadi salah satu alat untuk mengenalkan dan meleburkan budaya asal Hadhramaut dengan Indonesia. Musik gambus dan tarian samar yang khas Hadhramaut masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Hadhrami di Indonesia. Namun, gambus dan samar tersebut tak sepenuhnya ditampilkan sesuai dengan apa yang ada di

Hadhramaut. Penampilan budaya gambus dan samar oleh masyarakat Hadhrami di Indonesia mengalami akulturasi. Musik-musik gambus yang ditampilkan terkadang mengalami perubahan bahasa lirik tanpa menghilangkan nada khas musik gambus. Pembauran ini dilakukan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat umum.

Melalui akulturasi ini masyarakat lebih mudah mengenal musik dan lagu-lagu Arab. Tak hanya itu, balasyik dan grup-grup musik Arab lainnya di Indonesia semakin dikenal berkat akulturasi budaya yang dilakukan. Penerimaan masyarakat dapat dibuktikan dengan semakin meratanya penampilan grup musik balasyik dan musik Arab lainnya ke berbagai kalangan, acara, dan wilayah di Indonesia, seperti pondok pesantren, pernikahan, konser umum, hingga acara musik religi di TV 9. Upaya akulturasi yang dilakukan oleh grup musik yang dikelola masyarakat Hadhrami menjadi bukti kesekian dalam aktualisasi revolusi batin masyarakat Hadhrami.

Di bidang kegamaan, peranan masyarakat Hadhrami dalam menyebarkan ajaran agama Islam tak perlu diragukan lagi. Tentunya, penyebaran ajaran agama tak hanya sebatas nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya, tetapi penerapan

nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga dicontohkan oleh beberapa tokoh agama yang berasal dari masyarakat Hadhrami.

Dewasa ini masyarakat Hadhrami semakin eksis dengan munculnya ustadz-ustadz populer yang berasal dari kalangannya, seperti Khalid Basalamah, Subhan Bawazier, dan Syafiq Riza Basalamah. Penerimaan masyarakat yang cukup besar terhadap kehadiran mereka menjadikan legitimasi masyarakat Hadhrami sebagai etnis yang lebih banyak memahami ilmu agama semakin kuat. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat Hadhrami cukup banyak yang berperan dalam penyebaran ajaran agama Islam. Habib Syekh Al Musawa, Habib Bahar bin Smith, Ustadz

## **Kesimpulan**

Pergulatan identitas dalam revolusi batin masyarakat Hadhrami belum berakhir. Eksistensi pergulatan identitas dalam revolusi batin tetap ada dan mengalami pergeseran perdebatan. Perdebatan yang pada awalnya tentang sayid non-sayid, totok dan peranakan, berubah menjadi lebih kompleks. Saat ini, perdebatan tersebut tidak

Haikal Hassan, dan Habib Rizieq Shihab adalah beberapa contoh dari masyarakat Hadhrami yang memiliki nama besar dalam bidang keagamaan.

Tak hanya secara individu, masyarakat Hadhrami juga memiliki wadah pergerakan dalam menyampaikan nilai-nilai normatif dan aplikatif agama Islam. Al Irsyad Al Islamiyyah dan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah dua diantara wadah pergerakan dibidang keagamaan yang diinisiasi oleh tokoh agama masyarakat Hadhrami. Hingga saat ini, kedua wadah ini masih diterima dengan baik oleh masyarakat umum. Kehadirannya bahkan sangat disambut baik dan membantu masyarakat dalam pemahaman agama serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

sekadar dilihat dari segi pelaku, tetapi perilaku eksklusivitas dan inklusivitas.

Revolusi Batin merupakan tolak ukur dalam menganalisis eksistensi pergulatan mencari identitas masyarakat Hadhrami di Indonesia. Aktualisasi revolusi batin yang belum sepenuhnya membuktikan wacana Sumpah Pemuda Arab 1934 bukanlah puncak pergulatan identitas masyarakat

Hadhrami di Indonesia. Perilaku eksklusif masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Hadhrami di beberapa bidang kehidupan, seperti pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan. Perilaku eksklusif berupa pembatasan diri terhadap lingkungannya bertujuan untuk menjaga eksistensi identitasnya sebagai masyarakat Hadhrami di Indonesia. Pernikahan merupakan salah satu contoh eksklusifitas sebagian masyarakat Hadhrami yang bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat Hadhrami lainnya tetap melanjutkan wacana revolusi batin yang digagas oleh Abdurrahman Baswedan. Peran masyarakat Hadhrami di berbagai bidang dalam pembangunan Indonesia seperti, politik, pendidikan, sosial, dan sebagainya menjadi bukti nyata aktualisasi revolusi batin. Yayasan Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah Surabaya dan Yayasan Al Khairiyyah Surabaya adalah salah satu contoh gerakan reformatif yang dilakukan masyarakat Hadhrami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks interaktif politik identitas, terdapat upaya mendapat pengakuan oleh suatu kelompok dan tanggapan diakui oleh kelompok lainnya. Melalui revolusi batinnya, masyarakat

Hadhrami berupaya untuk menunjukkan eksistensi dan mendapat pengakuan oleh masyarakat umum. Tanggapan masyarakat umum atas keberadaan dan kontribusi masyarakat Hadhrami di Indonesia cukup baik. Keberadaan organisasi Al Irsyad al-Islamiyyah, Jami'at al-Khayr, Yayasan Majelis Amal Sholeh, Yayasan Al Iskan cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Secara perorangan, Anies Baswedan, dr. Gamal Albinsaid, Najwa Shihab, Syafiq Riza Basalamah, Subhan Bawazier adalah beberapa contoh masyarakat Hadhrami yang menjadi tokoh publik dan diakui kontribusinya oleh masyarakat. Terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menjadi bukti semakin terbukanya masyarakat terhadap kemajemukan dan pluralitas yang ada. Peningkatan kesadaran masyarakat Hadhrami untuk menjadi pelaku pembangunan di lingkungannya berdampak pada menguatnya eksistensi masyarakat Hadhrami dalam masyarakat. Dengan demikian, legitimasi identitas yang dibangun oleh belanda di masa penjajahan bahwa masyarakat Hadhrami bukan bagian dari Indonesia telah berubah disebabkan proyek identitas revolusi batin yang dilakukan oleh masyarakat Hadhrami hingga sekarang.

## Daftar Pustaka

- Algadri H (1988) Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia. Jakarta: Haji Masagung
- Basri S (2014) Melampaui Mimpi Anies Baswedan @twitterland. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Berg LWC van den (2010) Orang Arab di Nusantara, terjemahan Rahayu Hidayat. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Berg LWC van den (1989) Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, terjemahan Rahayu Hidayat. Jakarta: INIS.
- Gaus, Gerald F, & Chandran K (2012) Handbook Teori Politik. Terjemahan oleh Derta SW. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Harrison L (2007) Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Prenada Media Group
- Hayaze' NK (2015) AR Baswedan : Sang Perintis Revolusi Batin. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Hayaze' NK (2017) Kumpulan Tulisan & Pemikiran Hoesin Bafagieh : Tokoh PAI dan Nasionalis Keturunan Arab. Jakarta: Menara Center.
- Kesheh NM (2007) Hadrami Awakening : Kebangkitan Hadhrami di Indonesia, diterjemahkan Ita Mutiara dan Andri. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- al-Masyur IA (2013) Sejarah, Silsilah dan Gelar Etnis Nabi Muhammad Saw di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika. Jakarta: Saraz Publishing
- Meyer T (2004) Politik Identitas Tantangan Terhadap Fundamentalisme Moderen. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung dan Pemuda Muhammadiyah
- Shahab MA (2017) Sang Penyebar Berita Proklamasi RI : Perjuangan M. Asad Shahab & Arabian Press Board. Jakarta: Change.

## Buku Elektronik

- Buchari, SA (2014) Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [Diakses 1 Oktober 2018] [https://books.google.co.id/books?id=m61dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=m61dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

## Artikel Jurnal (Elektronik)

- Azzuhri, M (2016) Bahasa dan Kearifan Lokal: Harmonisasi Sosial Masyarakat Arab –Jawa di Kampung Arab. *Journal of Arabic Studies* 1 (2) [Diakses 6 Oktober 2018] p.90. <http://journal.imla.or.id/>
- Amaruli RJ, Nazala NM, & Singgih TS (2018) Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadrami di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3 (2) [Diakses 6 Oktober 2018] p.121. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/view/1974>